

POTRET ISLAM ACEH: DISKURSUS KEULAMAAN DAN TRADISI PENULISAN KITAB MELAYU

Oleh:

Hasan Basri

Dosen Fakultas Tarbiyah dan Keguruan/Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Email: hasbaria.qudwah@gmail.com

Abstract

Acehnese social life is strongly tied with the social and religious institutions such as Meunasah, Mosque, Dayah, Madrasah and other religious affairs institutions. This strong relation is due to their strong even fanatic religious characters possessed by Acehnese. Although they do not perform all the religious rites, their religious sensibility is predominantly obvious. Acehnese Ulamas, at least for about seven centuries, were once very active in producing religious literatures from various branch of knowledges such as Tauhid, Fiqh, Tasawwuf, Tafseer, Hadist, Falak, literatures and histories. This productivity, written in Malay Language, reached its momentum starting from 16th – 19th century. During these centuries, the connection of Acehnese Ulama was significantly active and intensive hence the knowledge transmission between continents particularly within the areas of India, Persia, Arabs and Nusantara happened.

Keywords : Islam, Discourses, Ulama, Malay Kitab

Abstrak

Kehidupan masyarakat Aceh erat kaitannya dengan lembaga-lembaga sosial dan keagamaan, antara lain: *meunasah*, masjid, *dayah*, madrasah, dan kantor urusan agama. Hubungan antara masyarakat dengan lembaga-lembaga tersebut adalah karena sifat religius dan fanatik dalam beragama. Meskipun kadang-kadang pengamalan ajaran agama jarang dilaksanakan secara utuh dan disiplin oleh sebagian masyarakat, karena lemah keimanan dan ketaqwaan, rasa simpati terhadap agama sangat menonjol. Semua lembaga sosial dan keagamaan tersebut merupakan pusat perkumpulan anggota masyarakat meskipun secara umum peranan dan fungsinya berbeda antara satu dengan yang lain; namun tujuan akhir adalah sama, yakni sebagai wadah pemersatu. Para ulama Aceh dalam rentang waktu kurang lebih tujuh abad tergolong produktif dalam melahirkan karya-karya Melayu dalam berbagai bidang keilmuan, termasuk ilmu tauhid, Fiqh, tasawuf, tafsir, ilmu hadis, ilmu falak, sastra dan kisah-kisah masa lalu. Produktivitas kitab-kitab Melayu menemukan momentumnya pada abad ke-16 sampai abad ke-19. Pada abad-abad ini, koneksi ulama-ulama Aceh dengan dunia luar begitu aktif dan intensif sehingga terjadi transmisi ilmu di kalangan para ulama antar benua, terutama kawasan India, Persia, Arab dan Nusantara.

Kata Kunci: Potret Islam, Diskursus, Keulamaan, Kitab Melayu

A. Pendahuluan

Sejauh ini, kajian komprehensif mengenai diskursus potret dan identitas Islam dan tradisi penulisan kitab Melayu oleh ulama-ulama di Aceh belum mendapat perhatian para ahli secara serius. Pada kenyataannya, tidak sedikit ulama Aceh yang begitu produktif dalam menulis karya-karya berbahasa Melayu; bahkan sebagiannya ditulis dalam bahasa Arab. Sementara itu, Aceh secara historis merupakan wilayah yang paling awal mendapat sentuhan atau pengaruh Islam di Nusantara dengan corak yang unik. Kemudian dari daerah ini Islam berkembang ke pulau Jawa, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan bahkan sampai ke wilayah Melayu (Malaka dan Malaysia). Melalui lisan para ulama, saudagar, dan juru dakwah profesional Islam telah memasuki wilayah-wilayah yang sebelumnya telah mendapat sentuhan agama Hindu dan Budha; aliran kebatinan dan kepercayaan. Upaya penyebaran ajaran Islam disampaikan dengan penuh kelembutan dan kedamaian, baik melalui jalur dagang, pendekatan persuasif dengan raja-raja yang sedang berkuasa maupun melalui perkawinan. Di samping itu para ulama Aceh khususnya, dan ulama-ulama Melayu Nusantara pada umumnya, tidak saja menyebarkan dakwah secara lisan tetapi juga melalui tulisan yakni dengan menulis kitab-kitab berbahasa Melayu (Arab-Melayu) dalam bahasa lokal atau daerah. Kitab Arab-Melayu sering disebut *Kitab Arab Jawoe* atau Arab-Jawi, yang ditulis dengan aksara Arab-Melayu dalam bahasa Aceh. Sebab itu, masyarakat Aceh pada umumnya lebih mengenal dan akrab dengan bahasa atau tulisan Arab-Melayu daripada bahasa atau aksara Latin atau bahasa Indonesia.

Tulisan ini mencoba memaparkan tentang gairah diskursus keilmuan Islam dan tradisi penulisan kitab Melayu di Aceh ditinjau dari perspektif historis, sosiologis, dan politis. Tinjauan dari ketiga perspektif ini didasarkan pada tiga alasan: *pertama*, pertimbangan bahwa pembahasan tentang Islam di Aceh tidak dapat dipisahkan dari sejarah masuknya Islam ke wilayah itu. *Kedua*, secara sosiologis, Aceh merupakan tempat berlabuh atau transit berbagai bangsa yang mengadakan perjalanan dagang ke negara-negara lain di dunia. Dan *ketiga*, dalam perspektif politik, Aceh telah eksis sebagai negara berdaulat dengan sistem kerajaan sejak abad ke-13. Sejak itu, kerajaan Aceh telah menjalin hubungan diplomatik dan hubungan dagang dengan negara-negara lain di dunia. *Keempat*, ulama-ulama Aceh tempo dulu, semenjak abad-abad ke-13 sampai abad ke-19 telah berperan aktif sebagai juru dakwah Islam dan guru agama. Penyampaian ajaran-ajaran agama kepada masyarakat luas tidak semata-mata dilakukan secara lisan melainkan juga melalui tulisan. Para ulama Aceh dalam rentang waktu kurang lebih tujuh abad itu tergolong produktif dalam melahirkan karya-karya Melayu dalam berbagai bidang keilmuan, termasuk ilmu tauhid, Fiqh, tasawuf, tafsir, ilmu hadis, ilmu falak, sastra dan kisah-kisah masa lalu. Produktivitas kitab-kitab Melayu menemukan momentumnya pada abad-abad ke-16 sampai abad ke-19. Pada abad-abad ini, koneksi ulama-ulama Aceh

dengan dunia luar begitu aktif sehingga terjadi transmisi ilmu di kalangan para ulama antar benua, terutama kawasan India, Persia, dan Arab. Sebelum diuraikan lebih lanjut, ada baiknya terlebih dulu digambarkan secara umum daerah Aceh.

B. Gambaran Umum Daerah Aceh

1. Letak Geografis

Secara geografis, daerah Aceh, sekarang disebut Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, merupakan provinsi yang terletak di kawasan paling ujung bagian Utara Pulau Sumatera yang sekaligus merupakan ujung paling Barat wilayah Indonesia. Batas-batas Nanggroe Aceh Darussalam adalah: sebelah Utara dan Timur berbatasan dengan Selat Malaka, sebelah Selatan berbatasan dengan Provinsi Sumatera Utara, dan sebelah Barat berbatasan dengan Samudera Indonesia. Satu-satunya hubungan darat hanya lah dengan Provinsi Sumatera Utara. Luas Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam 57.365,57 km².¹

2. Pemerintahan

Sesuai dengan perkembangannya, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dengan ibukota Banda Aceh semakin diperluas dari segi pemerintahannya dari 10 kabupaten/kota pada tahun 2000 menjadi 20 kabupaten/kota pada Mei 2003. Kabupaten/kota yang berkembang ialah: 1) Aceh Barat Daya (pecahan dari Aceh Selatan); 2) Gayo Lues (pecahan dari Aceh Tenggara); 3) Aceh Tamiang dan Kota Langsa (pecahan dari Aceh Timur); 4) Nagan Raya dan Aceh Raya (pecahan dari Aceh Barat); dan 5) Kabupaten Bireuen dan Kota Lhokseumawe (pecahan dari Aceh Utara). Kemudian, pada Januari 2004 bertambah menjadi 21 kabupaten/kota dengan kabupaten/kota baru yaitu Kabupaten Bener Meriah (pecahan dari Kabupaten Aceh Tengah. Di samping itu, Kabupaten Pidie merupakan kabupaten terbesar dilihat dari perangkat wilayah administrasinya.² Kabupaten Pidie ini kemudian dipecah dua menjadi Kabupaten Pidie Jaya. Sejak tahun 2015, bertambah lagi tiga kabupaten/kota di Provinsi Aceh sehingga mencapai 23 kabupaten/kota. Dengan pemekaran kabupaten dan kota di Aceh memungkinkannya untuk terus berkembang baik secara politik maupun ekonomi. Di samping itu, aspek budaya pun tanpa dapat dielakkan

¹ Bandingkan, *Aceh dalam Angka (Aceh in Figures)*, (Nanggroe Aceh Darussalam: Badan Pusat Statistik dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, 2003), hlm. 3.

²*Aceh dalam Angka ...*, hlm. 13.

terpengaruh juga oleh dunia luar. Lebih-lebih lagi pasca-tsunami di Aceh, kondisi sosial-budaya dan ekonomi tumbuh dan berkembang begitu cepat terutama di kota Provinsi Aceh, Banda Aceh.

Adapun jumlah kabupaten/kota secara keseluruhan dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:³

NOMOR URUT	KABUPATEN/KOTA	IBUKOTA/PUSAT PEMERINTAHAN
01	Kabupaten Aceh Besar	Jantho
02	Kabupaten Aceh Jaya	Calang
03	Kabupaten Aceh Barat	Meulaboh
04	Kabupaten Aceh Barat Daya	Blangpidie
05	Kabupaten Nagan Raya	Sukamakmu
06	Kabupaten Aceh Selatan	Tapak Tuan
07	Kabupaten Aceh Singkil	Singkil
08	Kabupaten Simeulu	Sinabang
09	Kabupaten Aceh Tenggara	Kutacane
10	Kabupaten Aceh Tamiang	Karang Baru
11	Kabupaten Aceh Timur	Idi Rayeuk
12	Kabupaten Aceh Utara	Lhoksukon
13	Kabupaten Bireuen	Bireuen
14	Kabupaten Aceh Tengah	Takengon
15	Kabupaten Bener Meriah	Simpang Tiga Redelong
16	Kabupaten Gayo Luwes	Blang Kejeren
17	Kabupaten Pidie	Sigli
18	Kabupaten Pidie Jaya	Meureudu
19	Kota Banda Aceh	Banda Aceh
20	Kota Sabang	Sabang
21	Kota Lhokseumawe	Lhokseumawe
22	Kota Langsa	Langsa
23	Kota Subulussalam	Subulussalam

3. Penduduk

Jumlah penduduk di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) menurut sensus penduduk tahun 2003 sebanyak 4.218.486 jiwa, terdiri dari 2.119.628 laki-laki dan 2.098.858 perempuan. Dengan demikian, angka pertumbuhan penduduk Provinsi NAD periode 2002-2003 adalah 1,26 persen. Sejak akhir tahun 1999 perpindahan penduduk ke provinsi yang sering dilanda konflik ini menurun, sehingga

³*Aceh dalam Angka, ...*, hlm. 14. Sejak terjadi reformasi politik di Indonesia, Aceh sebagaimana daerah-daerah lain juga mengalami pemekaran kabupaten/kota seiring dengan transformasi geopolitik, seperti Kabupaten Pidie terjadi pemekaran wilayah dan kemudian lahir satu kabupaten baru, yaitu Pidie Jaya dengan ibukotanya, Meureudu.

pertambahan penduduk hasil migrasi *netto* menurun drastis.⁴ Sementara itu penduduk yang keluar daerah juga tidak sedikit. Setelah bencana gempa bumi dan gelombang Tsunami tahun 2004, penduduk Aceh mengalami penurunan drastis karena korban bencana tersebut yang diperkirakan mencapai sedikitnya 300.000 jiwa.

4. Agama

Penduduk Provinsi Aceh mayoritas beragama Islam dengan persentase 98,72 persen. Sedangkan yang lain beragama Kristen Protestan sebanyak 0,96 persen; beragama Budha sebanyak 0,16 persen; beragama Kristen Katolik sebanyak 0,14 persen. Selain itu, ada 0,02 persen beragama Hindu.⁵ Berdasarkan data ini dapat diketahui bahwa di Aceh terdapat pemeluk agama yang berbeda-beda. Namun, di tengah pluralitas agama tersebut, hampir tidak ditemukan konflik antar umat beragama sepanjang konflik yang pernah terjadi di bumi Serambi Mekah itu. Ini mengindikasikan bahwa masyarakat Aceh, secara sosiologis dan kultural, dikenal ramah dan santun terhadap orang lain tanpa mempersoalkan agama yang dianutnya. Masyarakat Aceh juga ingin menunjukkan bahwa ajaran Islam menyuruh umatnya agar menghormati keberadaan para penganut agama lain. Secara kultural, masyarakat Aceh dikenal suka menerima tamu dan menyantuninya. Budaya *kenduri* (jamuan makan bersama) merupakan kebiasaan yang sudah melekat dalam jiwa orang-orang Aceh. Maka, dalam masyarakat Aceh setiap ada upacara adat dan agama tidak jarang ditemukan pesta jamuan makan bersama atau *kenduri*. Memuliakan dan menghormati tamu, dalam pandangan masyarakat Aceh, adalah wajib. Dalam kehidupan sehari-hari, kadang kala didapati sebagian orang Aceh lebih mementingkan tamunya daripada dirinya atau keluarganya sendiri. Begitulah sebenarnya ciri khas masyarakat Aceh di mana tamu dianggap sebagai saudaranya sendiri.

5. Struktur Sosial

Masyarakat Aceh memiliki struktur sosial tersendiri yang diatur berdasarkan hukum, *Qanun Meukuta Alam Al-Asyi* (undang-undang negara Aceh berdasarkan syari'at Islam). Kekuasaan tertinggi berada di tangan Sultan, sedangkan kekuasaan agama di tangan ulama. Di bawah Sultan ada *Ulee Balang* (hulu balang) yang menguasai wilayah tertentu dengan hak otonomi luas. *Ulee Balang* membawahi beberapa *Imum Mukim*⁶ dan di bawah *Imum Mukim* terdapat beberapa *Keuchik*

⁴ *Aceh dalam Angka ...*, hlm. 25.

⁵ *Aceh dalam Angka,*, hlm. 64.

⁶ *Mukim* merupakan kumpulan dari beberapa kampung (desa), dan setiap mukim dipimpin oleh kepala mukim atau disebut juga *Imum Mukim*.

(kepala desa). *Keuchik* dipilih oleh *Tuha Peuet* dan *Tuha Lapan*⁷ yang terdiri dari tokoh-tokoh desa.⁸

Berdasarkan struktur sosialnya, masyarakat Aceh terdiri dari:

- a. Masyarakat umum (*awam*), yang terdiri dari berbagai suku atau bangsa yang menetap di Aceh.
- b. Kaum hartawan atau orang kaya yang memiliki harta dan dekat dengan pusat kekuasaan.
- c. Kaum bangsawan atau dikenal dengan sebutan *Teuku* (T), yang mendapat kepercayaan dari Sultan untuk menguasai wilayah-wilayah tertentu.
- d. Kelompok *habib* (jamak: *haba'ib*), yaitu mereka yang mengklaim diri sebagai keturunan Nabi Muhammad; mereka datang dari Mekah, Madinah, Yaman, dan Hadhramaut yang kedudukan mereka sangat terhormat di mata masyarakat Aceh. Biasanya mereka dipanggil dengan istilah *Sayid*.
- e. Kaum ulama atau cendekiawan, yaitu alumni pendidikan tradisional, Dayah Manyang, setara universitas. Mereka biasanya dipanggil *Teungku* (Tgk) karena ahli dalam bidang agama.⁹

Selanjutnya, sistem pemerintahan Aceh, masa Kerajaan Aceh Darussalam, tersusun dari *gampong*, *mukim*, *nanggroe*, *sagoe*, dan kerajaan. Sebagai elaborasi istilah-istilah ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. *Gampong* (kampung), disebut juga *Meunasah* yang dipimpin oleh seorang *Keuchik* (kepala kampung). Sedangkan *Meunasah* dipimpin oleh seorang *Imum* (imam). *Gampong* diberi hak otonomi khusus.
- b. *Mukim*, yaitu federasi dari beberapa *gampong*, sedikitnya delapan *gampong*. *Mukim* dipimpin oleh seorang *Imum Mukim* dan seorang *Kadhi Mukim* (hakim tingkat mukim) serta dibantu oleh beberapa orang wakil. Dalam setiap *Mukim* didirikan sebuah masjid untuk shalat jama'ah dan shalat Jum'at.
- c. *Nanggroe*, biasanya disebut daerah *Ulee Balang* terdiri dari tiga sampai sembilan *Mukim*. *Nanggroe* dipimpin oleh seorang *Ulee Balang* dan dibantu oleh seorang *Kadhi Nanggroe*, dan mempunyai hak otonomi khusus dalam batas-batas tertentu.
- d. *Sagoe*, ialah federasi dari beberapa *Nanggroe*. *Sagoe* ini dipimpin oleh seorang panglima, disebut Panglima *Sagoe* (Aceh: *Pang Sagoe*).

⁷ *Tuha Peuet* dan *Tuha Lapan* adalah tokoh-tokoh masyarakat berjumlah delapan orang yang diberikan wewenang untuk menyelesaikan perkara di suatu kampung, termasuk memilih dan mengangkat kepala kampung.

⁸ Lihat A.K. Jakobi, *Aceh Daerah Modal*, (Jakarta: Yayasan Seulawah, 1998), hlm. 39.

⁹ Bandingkan, Syarifudin Tippe, *Aceh di Persimpangan Jalan*, (Jakarta: Cidesindo, 2000), hlm. 3.

- e. *Kerajaan*, dengan nama lengkapnya, Kerajaan Aceh Darussalam yang dipimpin oleh seorang raja yang bergelar Sultan Imam Malikul Adil dan dibantu oleh seorang Kadhi Kerajaan yang bergelar Kadhi Malikul Adil.¹⁰

Struktur seperti tertera di atas tidak sepenuhnya dianut dalam sistem pemerintahan sekarang. Namun, beberapa istilah, seperti *nanggroe*, *mukim*, dan *gampong* atau *meunasah* masih dipakai. Namun, struktur pemerintahannya sudah berubah karena sekarang mengikuti struktur yang ditetapkan pemerintah pusat. Sejak diberikan hak otonomi untuk Aceh, beberapa istilah populer dalam struktur pemerintahan masa lampau mulai digunakan kembali dengan modifikasi.

C. Sejarah Awal Masuknya Islam ke Aceh

Sebelum agama Islam masuk ke Aceh, Aceh telah menjalin hubungan dagang dengan negeri India, Persia, Arab, Tiongkok, dan sebagainya. Hubungan timbal balik ekonomi antara Aceh dengan dunia luar telah memberi pengaruh signifikan dalam kehidupan rakyat Aceh, seperti halnya orang India yang beragama Hindu datang ke Aceh, tentu membawa pengaruh terhadap penduduk Aceh baik secara langsung maupun tidak langsung. Namun, sejauh mana pengaruh tersebut belum dapat diketahui secara pasti. Menurut Mukti Ali, “agama Islam masuk ke Indonesia telah bercampur dengan elemen-elemen Hindu.”¹¹ Pernyataan ini ada benarnya jika sampelnya adalah agama Islam dalam masyarakat Jawa; tetapi tidak sepenuhnya benar bagi Islam dalam masyarakat Aceh. Karena, Islam di Aceh langsung dibawa oleh para saudagar Arab yang merantau ke Aceh; dan di Aceh ajaran Hindu tidak begitu mengakar seperti di Jawa.

Hampir semua ahli sejarah menyatakan bahwa daerah Indonesia yang mula-mula dimasuki Islam ialah daerah Aceh. Hanya di antara para ahli itu terjadi perbedaan pendapat mengenai kepastian tahun masuknya Islam. Dalam kaitan ini, ada tiga teori yang berkembang: *pertama*, agama Islam secara berangsur-angsur datang ke Indonesia sejak abad pertama Hijriyah atau sekitar abad ke-7 dan 8 Masehi; dan langsung dari Arab. *Kedua*, penyiaran Islam di Indonesia adalah dengan cara damai, bukan dengan pedang dan kekuasaan; dan *ketiga*, kedatangan Islam di Indonesia membawa kecerdasan dan peradaban yang tinggi dalam membentuk kepribadian Indonesia.¹²

Berkenaan dengan teori-teori kedatangan Islam di Indonesia, Azyumardi Azra mengakui bahwa sejauh menyangkut kedatangan Islam di Nusantara, terdapat diskusi dan perdebatan panjang di antara para ahli mengenai tiga masalah pokok:

¹⁰ Bandingkan, A. Hasjmy, *50 Tahun Aceh Membangun*, (Banda Aceh: MUI Aceh, 1995), hlm. 31-32.

¹¹ Mukti Ali, *Alam Pikiran Modern di Indonesia*, (Jakarta: Tintamas, 1964), hlm. 4.

¹² A. Hasjmy, *Sejarah Masuk dan Berkembangnya Islam di Indonesia*, (Bandung: PT. Alma'arif, 1993), hlm. 38-39.

pertama, tempat asal kedatangan Islam; *kedua*, para pembawanya; dan *ketiga*, waktu kedatangannya. Menurut Azra, berbagai teori dan pembahasan yang berusaha menjawab ketiga masalah pokok ini jelas belum tuntas, tidak hanya karena keterbatasan data yang dapat mendukung suatu teori tertentu, tetapi juga karena sifat sepihak dari berbagai teori yang ada.¹³

Kebanyakan sarjana asal Belanda memegang teori yang mengatakan bahwa asal usul Islam di Nusantara adalah anak Benua India, bukan Persia atau Arabia. Sarjana pertama yang mengemukakan teori ini adalah Pijnappel. Teori ini kemudian dikembangkan oleh Snouck Hurgronje, yang menegaskan bahwa begitu Islam berpijak kokoh di beberapa kota pelabuhan Anak Benua India, banyak di antara mereka tinggal di sana sebagai pedagang perantara dalam perdagangan Timur Tengah dengan Nusantara; kemudian datang ke Dunia Melayu Indonesia sebagai para penyebar Islam pertama. Selanjutnya, teori yang menyatakan bahwa Islam di Nusantara berasal dari Bengal.¹⁴ Dengan kata lain, teori kedatangan Islam ke Indonesia dapat dibagi ke dalam dua kelompok: *pertama*, agama Islam datang ke Indonesia melalui Persia dan Gujarat; *kedua*, kedatangan agama Islam di Indonesia langsung dari Jazirah Arabia.

Setelah membahas teori-teori kedatangan Islam ke Nusantara secara panjang lebar, Azra menyimpulkan: *pertama*, Islam masuk ke Nusantara dibawa langsung dari Arabia; *kedua*, Islam diperkenalkan oleh para guru dan penyair “profesional”, yaitu mereka yang memang khusus bermaksud menyebarkan Islam; *ketiga*, yang mula-mula memeluk agama Islam adalah para penguasa; dan *keempat*, kebanyakan para penyebar Islam “profesional” itu datang ke Nusantara pada abad ke-12 dan ke-13 Masehi. Berdasarkan pertimbangan ini, mungkin benar bahwa Islam sudah diperkenalkan di Nusantara pada abad-abad pertama Hijriyah.¹⁵

Menyangkut masuknya Islam ke Aceh telah diadakan seminar sejarah Islam di Banda Aceh tahun 1978, sebagai kelanjutan seminar yang pernah diadakan sebelumnya di Medan tahun 1963, yang menegaskan bahwa agama Islam sudah masuk ke Nusantara pada abad pertama Hijriyah langsung dari tanah Arab. Kemudian, peserta seminar sepakat bahwa daerah yang mula-mula masuk dan menerima Islam di Nusantara adalah Aceh.¹⁶

Namun demikian, setelah mempelajari sejarah Islam dan teori-teori secara cermat mengenai masuknya Islam ke Nusantara, tidak dapat dipungkiri bahwa Islam masuk ke Aceh melalui dua jalur: *pertama*, Islam datang di Aceh langsung dari Saudi Arabia; dan *kedua*, Islam masuk ke Aceh melalui para ulama (juru dakwah) dari Persia dan Gujarat India. Kedatangan para ulama ke Aceh dengan menggunakan perahu atau kapal laut. Ada di antara mereka yang khusus untuk berdakwah

¹³ Lihat, Azyumardi Azra, *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII & XVIII* (Jakarta: Prenada Media, 2004), hlm. 2.

¹⁴ Azyumardi Azra, *Jaringan Ulama ...*, hlm. 3.

¹⁵ Azyumardi Azra, *Jaringan Ulama ...*, hlm. 12.

¹⁶ A. Hasjmy, *Sejarah Masuk....*, hlm. 52.

(menyebarkan Islam) dan ada pula yang bertujuan untuk dagang; namun di samping dagang mereka menyebarkan Islam. Ini menandakan bahwa Islam tidak dapat dipisahkan dari aktivitas ekonomi; dan sebagian pedagang dapat memanfaatkan sebagian waktu mereka untuk menyebarkan Islam kepada penduduk di mana mereka singgah. Ada indikasi kuat bahwa orang-orang Aceh terpengaruh oleh para penyebar Islam tersebut, misalnya dalam masyarakat Aceh sampai sekarang masih terdapat tradisi yang mirip dengan India, Persia, dan Arab, baik dalam tata cara berpakaian maupun makanan.

D. Pengaruh Islam terhadap Masyarakat Aceh

Pengaruh Islam terhadap kehidupan masyarakat Aceh sekurang-kurangnya dapat dilihat dalam dua aspek, yaitu aspek adat dan hukum Islam dan sikap masyarakat terhadap Islam.

a. Adat dan Hukum Islam

Adat adalah suatu tradisi yang secara turun temurun dipraktikkan oleh masyarakat Aceh dan kemudian disosialisasikan oleh para praktisi hukum. Di samping adat, sebagai landasan berperilaku dan tuntunan hidup dari nenek moyang, juga diturunkan secara berkesinambungan kepada generasi selanjutnya melalui lembaga adat. Adat di sini merupakan norma tertulis dan tidak tertulis, yang menjadi pedoman di dalam bermasyarakat. Dalam masyarakat Aceh, adat dan hukum tidak boleh bertentangan dengan agama. Apa saja yang diputuskan oleh pemimpin atau penguasa harus selaras dengan ketentuan agama (*syari'at*). Jika adat bertentangan dengan agama, maka hukum adat itu tidak berlaku.

Masuknya agama Islam ke Aceh pada abad ke-7 atau pertama Hijriyah telah mempengaruhi adat istiadat Aceh. Dalam melaksanakan hukum adat, masyarakat Aceh sangat memperhatikan kesesuaiannya dengan *syari'at* Islam. Dalam perspektif masyarakat Aceh, adat haruslah bersendi *syara'*. Selanjutnya, berkenaan dengan hukum Islam, masyarakat Aceh mengamalkannya seperti pelajaran yang mereka terima dari para guru agama atau ulama. Mereka berpedoman pada Al-Qur'an, *Sunnah*, *Ijma'*, dan *Qiyas*.¹⁷ Untuk mengingatkan masyarakat dalam pengamalan hukum Islam, dibuatlah sebuah formulasi filsafat hidup, *Hadih Maja* yang menandakan tentang otoritas penegakan hukum dalam kehidupan sosial, misalnya:

¹⁷ Al-Qur'an adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan membacanya adalah ibadah. Al-Qur'an merupakan sumber hukum pertama dalam Islam. Sunnah adalah tradisi atau amalan Nabi Muhammad SAW yang dijadikan sebagai standar dalam setiap praktik ajaran Islam. Sunnah ini dipandang sebagai sumber ajaran Islam kedua setelah Al-Qur'an. Sedangkan *Ijma'* adalah kesepakatan para ulama mengenai suatu hukum tentang sah atau tidaknya sesuatu; dan halal atau haramnya sesuatu yang didasarkan pada Al-Qur'an dan Sunnah. *Qiyas* adalah analogi hukum yang dapat dijadikan sebagai referensi dalam pengamalan atau penetapan hukum yang tidak terdapat dalilnya secara jelas baik dalam Al-Qur'an maupun dalam Sunnah.

Adat bak Poteu Meureuhom
Hukom bak Syiah Kuala
Qanun bak Putroe Phang
Reusam bak Laksamana
Hukom ngon Adat lagee Zat ngon Siphueuet

Otoritas adat berada di tangan Sultan
Otoritas hukum berada di tangan ulama, Syiah Kuala¹⁸
Tatakrama pergaulan diatur oleh Putri Pahang
Upacara adat diatur oleh Panglima
Hukum dan Adat seperti Zat dengan Sifat

Pokok-pokok pandangan hidup itu mengandung makna penting dalam tiga dimensi kehidupan:

- a. Sistem kehidupan negara dan rakyat haruslah berjiwa dan bersendi Islam.
- b. Aspek politik kenegaraan dan Islam dalam sistem masyarakat Aceh telah menyatu.
- c. Kerja sama antara ulama dan sultan berjalan harmonis dan penegakan hukum dilakukan dengan melibatkan semua unsur terkait sesuai dengan bidangnya masing-masing.

Masyarakat Aceh kaya dengan adat istiadat, kesenian dan tari-tarian. Untuk setiap kabupaten mempunyai perbedaan dan variasi masing-masing. Hal ini dapat dilihat pada upacara-upacara perkawinan, kelahiran bayi, turun ke sawah, turun ke laut, *peusijuek* (acara tepung tawar)¹⁹, kenduri Maulid Nabi Muhammad, *Nuzulul Qur'an* (sejarah turunnya al-Qur'an), dan lain-lain. Bentuk budaya dapat dilihat pada ornamen/kaligrafi, rumah-rumah adat, *meunasah*, *balee*, *dayah*/rangkang dengan kesenian *dalailul khairat*, zikir/furdhanji, *nasyid*/rebana. Motif-motif adat lain dapat

¹⁸ Syiah Kuala adalah gelar yang diberikan kepada Syeikh Abdurrauf as-Singkili, ulama besar yang diangkat sebagai mufti dan *Qadhi Malikul Adil* selama periode empat Ratu di Aceh (1641-1699), yaitu Ratu Safiatuddin, Ratu Naqiyatuddin, Ratu Zakiatuddin, dan Ratu Keumalat Syah. Lebih lanjut mengenai sejarah keempat ratu ini, baca A. Hasjmy, *59 Tahun Aceh Merdeka di Bawah Pemerintahan Ratu*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1977).

¹⁹ *Peusijuek* berasal dari kata *sijuek* yang berarti sejuk, dingin, damai, segar, dan tenang. Dalam adat Aceh, *peusijuek* adalah upacara adat yang dilakukan untuk memberikan penghormatan kepada orang-orang tertentu, seperti menyambut tamu, pengantin baru, tokoh-tokoh masyarakat, dan memberi semangat kepada yang ditimpa musibah. *Peusijuek* dilambangkan dengan percikan air tepung tawar yang dicampur dengan dedaunan dan beras-padi; dan disematkan nasi ketan pada telinga kanan orang tersebut. Semua ini dilakukan dengan penuh khidmat dan diakhiri dengan do'a untuk memohon keselamatan dan keberkatan dari Allah yang Maha Kuasa.

dilihat pada perhiasan emas, perak, keramik, dan ukir-ukiran pada berbagai ornamen, termasuk pada batu nisan Aceh, ruang pelaminan dan aneka pakaian adat.²⁰

Demikian besarnya pengaruh Islam di Aceh sehingga sapaan waktu berjumpa dan berpisah menggunakan ucapan *Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh* (semoga keselamatan, kedamaian, kasih sayang Allah, dan keberkatan-Nya dilimpahkan kepadamu), atau disingkat dengan ucapan *Assalamu'alaikum* (selamat untukmu). Bila seseorang menerima pemberian dari orang lain, tidak mengucapkan kata yang lazim digunakan dalam bahasa Melayu, yaitu ucapan *terima kasih*, tetapi perkataan *Alhamdulillah Rabbil 'Alamin* (segala puji untuk Allah yang menguasai alam semesta) atau diucapkan secara singkat, *Alhamdulillah* (segala puji untuk Allah). Kalimat ini juga diucapkan ketika mengakhiri suatu kegiatan atau pekerjaan. Ketika melakukan suatu pekerjaan yang baik maka dimulai dengan mengucapkan *Bismillahir Rahmanir Rahim* (dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang). Apabila berjanji dengan seseorang, masyarakat Aceh biasanya menyebut kalimat *Insyallah* (jika Allah mengizinkan). Dan jika mendengar atau mengalami musibah (bencana atau malapetaka), seperti sakit atau kematian mereka mengucapkan *Inna Lillahi Wa Inna Ilaihi Raji'un* (sesungguhnya kami milik Allah dan kepada-Nya kami akan kembali). Kalimat-kalimat ini diucapkan merupakan refleksi iman kepada Allah dan terucap secara spontan. Menurut pandangan Islam, mengucapkan kalimat-kalimat suci itu merupakan ibadah kepada Allah dan bagi orang yang mengucapkannya akan diberi pahala (ganjaran) oleh Allah.

Dalam kehidupan sosial masyarakat Aceh, tangan kanan dan tangan kiri tidak sama nilainya. Tangan kanan biasanya digunakan untuk hal-hal yang baik dan bersih; sedangkan tangan kiri digunakan untuk hal-hal yang jelek dan kotor. Karena itu, memberi *salam* (sapaan) kepada orang lain dengan mengangkat tangan kiri dipandang tidak sopan. Demikian juga, memberi atau menerima sesuatu dengan tangan kiri juga dipandang tidak sopan, bahkan suatu penghinaan. Makan dan minum, mengambil sesuatu, atau memberi dan menerima senantiasa dilakukan dengan tangan kanan.

Tempat perkumpulan umum di tiap-tiap kampung (desa) disebut *Meunasah*.²¹ Kata *Meunasah* berasal dari bahasa Arab, *Madrasah* yang berarti sekolah atau tempat belajar. *Meunasah* dalam kehidupan masyarakat Aceh mempunyai multifungsi: antara lain, sebagai tempat belajar membaca Al-Qur'an, belajar agama, dan ilmu-ilmu lain dalam rangka pembinaan diri. Fungsi lain dari *Meunasah* adalah sebagai tempat shalat (sembahyang) lima waktu, dalam sehari semalam, di kampung itu. Dalam hubungan ini, posisi *Meunasah* harus berbeda dengan rumah biasa,

²⁰ Badruzzaman Ismail, *Mesjid dan Adat Meunasah sebagai Sumber Energi Budaya Aceh*, (Banda Aceh: Majelis Pendidikan Daerah, 2002), hlm. 69.

²¹ Di Sumatera Barat disebut *Surau*, sedangkan di Jawa dikenal dengan *Langgar* atau *Mushalla*.

supaya orang segera dapat mengenal mana rumah sebagai tempat tinggal dan mana pula sebagai tempat ibadah. Ketika sebuah Meunasah didirikan, yang paling utama diperhatikan adalah letak arah *Kiblat* (arah pandang ketika shalat yakni arah Masjidil Haram, *Baitullah* di Saudi Arabia). Di Aceh, umumnya di Indonesia, arah *Kiblat* adalah ke Barat. Maka, secara umum orang mengenal Barat sebagai arah *Kiblat*. Oleh sebab itu, ketika seseorang buang air kecil atau air besar tidak dibenarkan menghadap ke Barat atau ke arah *Kiblat*. Tetapi, segala perbuatan baik, termasuk posisi tidur, sebaiknya menghadap ke arah *Kiblat*. Fungsi lain dari *Meunasah* ialah sebagai tempat berkumpul, tempat bermusyawarah segala urusan, atau rapat warga masyarakat. Selain itu, Meunasah juga berfungsi sebagai tempat bermain anak-anak dan remaja, tempat tidur orang-orang yang masih lajang, dan tempat mengaji, ceramah agama, melaksanakan shalat-shalat sunat, sebagai tempat perdamaian, tempat pernikahan, dan tempat jamuan makan warga masyarakat di saat ada acara peringatan hari-hari besar agama seperti maulid Nabi Muhammad, dan acara *Qurban* (menyembelih hewan pada *Idul Adha* dan hari-hari *Tasyriq*).²²

Setiap *Meunasah* dipimpin oleh seorang Imam (Aceh: *imum*). Imam berperan untuk memimpin shalat berjama'ah dan bertanggung jawab terhadap eksistensi *Meunasah* dan jama'ah. Imam dibantu oleh seorang *bilal* (Aceh: *bileue*) yang bertugas sebagai juru *azan* atau *mu'azzin* (orang yang memanggil untuk shalat). Selain itu, dalam sistem sosial terdapat pula *Keuchik* (kepala kampung) dan *Tuha Peuet* (empat orang tua) yang dipilih orang warga masyarakat yang dipandang mempunyai pengaruh dan disegani selain memiliki pengetahuan yang memadai. Selain *Tuha Peuet*, juga ada *Tuha Lapan* (delapan orang tua) yaitu perangkat institusi *Tuha Peuet* kampung yang lebih lengkap, dengan menambah empat unsur lain: intelektual, pemuda, wanita, dan hartawan yang ada di kampung itu. Tambahan lagi adalah *Tuha Adat* yaitu tokoh adat yang secara individu dikenal paling berpengalaman dalam bidang adat kampung itu. Kalau ada konflik atau perselisihan antara warga masyarakat, misalnya, maka untuk mendamaikan antara kedua belah pihak yang bertikai adalah tugas bersama antara *Keuchik*, *Imum Meunasah*, *Tuha Peuet*, *Tuha Lapan*, dan *Tuha Adat*. Tetapi, menurut sekarang oleh pemerintah telah dimodifikasi dengan Lembaga Ketahanan Desa (LKMD) dan Lembaga Masyarakat Desa (LMD).

b. Sikap Masyarakat Aceh terhadap Islam

²² Di Meunasah diadakan berbagai aktivitas sosial-keagamaan sebagai media pendidikan bagi masyarakat, sehingga Meunasah disebut sebagai sekolah pertama. Sistem pergaulan dan solidaritas sosial terbentuk di Meunasah. Orang-orang laki-laki lajang yang sudah dewasa tidak lazim tidur di rumah, kebanyakan mereka tidur di Meunasah dan kalau mereka tidur di rumah, di malam hari, dianggap suatu yang memalukan. Mengenai *Qurban* merupakan suatu ibadah dalam Islam. *Qurban* artinya upaya mendekatkan diri kepada Allah dengan menyembelih hewan seperti sapi, kerbau, atau kambing pada tanggal 10, 11, 12, dan 13 Zulhijjah setiap tahun. Tujuannya adalah untuk menyantuni fakir miskin; namun, sebagian daging hewan tersebut boleh juga dinikmati oleh orang-orang kaya.

Sebagai hasil transformasi dan sosialisasi ajaran Islam yang dilakukan oleh para guru agama atau ulama sejak masuknya Islam ke Aceh, maka rakyat Aceh sangat fanatik kepada Islam. Sikap fanatik ini telah menggerakkan rakyat Aceh melawan penjajahan Belanda selama puluhan tahun. Sikap fanatik ini telah mempengaruhi keberanian orang Aceh untuk melawan segala bentuk kebatilan dan anti Islam. A. Hasjmy menggambarkan keberanian orang-orang Aceh karena dimotivasi oleh semangat agama yang mereka anut. Dengan semangat melawan kafir (Aceh: *kaphe*), sebagai musuh Islam, orang-orang Aceh yang mati dalam peperangan dinilai sebagai mati *syahid* dan meyakini bahwa mereka akan memperoleh surga sebagai tempat istirahat yang penuh kenikmatan. Semangat ini dikobarkan melalui *Hikayat Prang Sabi* (hikayat perang di jalan Allah).²³

Seorang penulis, asal Belanda, Paul van't Veer menerangkan dalam bukunya, *De Atjeh Oorlog*, bahwa perang Aceh melawan Belanda terus berkobar dari tahun 1873 sampai dengan tahun 1942. Ini berarti bahwa Aceh tidak pernah menyerah kepada Belanda sekalipun Sultan (Raja) dan sebagian pembesar lainnya telah dapat ditawan. Van Veer membagi perang Aceh melawan Belanda ke dalam empat periode: 1) Perang Aceh pertama tahun 1873; 2) Perang Aceh kedua tahun 1874-1880; 3) Perang Aceh ketiga tahun 1881-1896; dan 4) Perang Aceh keempat tahun 1897-1942.²⁴ Perang yang berlangsung selama 69 tahun itu menelan banyak korban jiwa dan biaya di pihak Belanda. Namun, dengan semangat jihad di jalan Allah, rakyat Aceh tidak pernah tunduk kepada Belanda.

Kefanatikan rakyat Aceh terhadap agama yang dianutnya tidak terbatas pada pengamalannya saja tetapi juga kiprahnya sehari-hari yang tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai Islami. Maka, orang Aceh dikenal pada perhatiannya yang besar pada agama, mampu membaca Al-Qur'an dengan fasih, taat beribadah, berakhlak mulia, dan menjauhkan diri dari perbuatan maksiat (kejahatan). Namun, ada juga sebagian orang Aceh yang hanya memiliki identitas Islam pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), dalam kesehariannya tidak menjalankan ajaran Islam secara konsisten. Ini tidak berarti dia membenci Islam, justru kefanatikannya kepada Islam luar biasa, dia tidak mau disebut dirinya kafir meskipun tidak mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. Dia akan membela Islam sampai mati dan akan melawan orang-orang yang mengatakan dirinya kafir. Baginya, orang Aceh identik dengan Islam. Setiap orang Aceh pasti beragama Islam.

²³ Hikayat ini dikarang oleh seorang ulama terkenal, Haji Muhammad Pante Kulu atau lebih populer dengan Teungku Chik Pante Kulu. Hikayat ini berisi kisah-kisah tentang: 1) Ainul Mardhiyah; 2) Pasukan Gajah; 3) Sa'id Salmy; dan 4) Kisah Muhammad Amin, seorang budak mati kemudian hidup kembali. Hikayat Prang Sabi ini, telah membakar semangat orang-orang Aceh dalam melawan kolonialis Belanda. Informasi lebih lanjut mengenai hikayat ini, baca A. Hasjmy, *Apa Sebab Rakyat Aceh Sanggup Berperang Puluhan Tahun Melawan Agresi Belanda*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1977). Baca juga, A. Hasjmy, *Peranan Islam dalam Perang Aceh dan Perjuangan Kemerdekaan Indonesia*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976).

²⁴ Lihat, Paul van't Veer, *De Atjeh Oorlog*, (Amsterdam: De Arbeiderspers, 1969).

Dalam hal perkawinan, baik menurut adat maupun syari'at (hukum Islam), calon isteri atau suami harus beragama Islam. Perkawinan beda agama tidak diperkenankan. Setiap calon suami atau istri harus memahami pokok-pokok ajaran Islam sebelum mereka melangsungkan pernikahan. Bahkan, dalam masyarakat tertentu, calon suami harus mampu membaca Al-Qur'an secara fasih dan taat beribadah, khususnya shalat *fardhu* lima waktu. Kefanatikan masyarakat Aceh kepada Islam tidak mereka kaku dalam pergaulan, bahkan mereka dapat membawa diri dalam berbagai situasi, namun nilai-nilai Islami tetap terjaga. Dalam kasus-kasus tertentu, ada juga sebagian orang Aceh yang terjebak ke dalam kemaksiatan atau kejahatan. Tetapi, jarang sekali orang Aceh pindah agama atau menganut agama lain.

Selanjutnya, dalam upacara perkawinan kelihatan tingkah laku agama secara lebih jelas. Jika dalam upacara-upacara peresmian yang bersifat lokal ada beberapa versi yang berbeda maka yang menjadi pertimbangan adalah persesuaiannya atau sejalanannya dengan hukum Islam. Sesaat sebelum nikah calon suami dituntun membaca *Bismillahir rahmanir rahim*, mengucapkan *Astaghfirullahal 'azhim* (aku memohon ampun dari segala dosa kepada Allah yang Maha Agung), membaca *shalawat* (berdo'a kepada Nabi Muhammad) dan mengucapkan dua kalimah *syahadat* yaitu *Asyhadu alla ilaha ilallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulallah* (aku bersaksi bahwa tiada tuhan selain Allah dan Muhammad adalah rasul Allah). Yang terakhir ini agar lebih mantap, selain daripada di bacakan dalam bahasa aslinya juga dituntun untuk diucapkan terjemahannya dalam bahasa Aceh atau bahasa Indonesia. Setelah semua itu selesai barulah dilakukan *ijab* (kata serah nikah dari pihak calon isteri) dan *qabul* (kata terima nikah dari calon suami). Kemudian, manakala para saksi telah yakin nikah itu sah, disampaikan *khutbah nikah*, yang berisikan nasihat-nasihat agar kedua pengantin bertaqwa kepada Allah, senantiasa beriman dan beramal shalih, bergaul dengan baik, saling cinta dan menghargai. Untuk keperluan ini sering kali sengaja diundang seorang ulama yang terhormat dengan harapan agar khutbahnya lebih mantap. Sebagai penutup dibacakan do'a oleh ulama tadi agar kedua pengantin diberkati oleh Allah dan keduanya dipertemukan dalam kebaikan, kebahagiaan, dan ketenangan serta dianugerahkan anak yang shalih.²⁵

c. *Ulama dan Lembaga Pendidikan Islam*

Gelar ulama diperoleh seseorang dengan dua syarat: *pertama*, mempunyai pengetahuan agama Islam; dan *kedua*, adanya pengakuan dari masyarakat. Syarat pertama dapat dipenuhi seseorang sesudah ia menempuh masa belajar yang cukup lama. Sedangkan syarat kedua baru dapat dipenuhi setelah masyarakat melihat kemuliaan akhlak, kedalaman pengetahuan, dan ketaatannya terhadap ajaran agama

²⁵ Taufik Abdullah (Ed.), *Agama dan Perubahan Sosial*, (Jakarta: CV. Rajawali, 1983), hlm. 120-121.

Islam. Mengetahui saja tanpa mengamalkan pengetahuan itu tidak cukup untuk menarik pengakuan dari masyarakat. Di Aceh, ulama umumnya tamatan *dayah*²⁶ (pesantren). Sedangkan tamatan universitas tidak disebut ulama.

Dalam masyarakat Aceh terdapat sekelompok ulama (tradisional) dipanggil dengan sebutan Teungku (Tgk) di depan namanya, sedangkan ulama intelektual umumnya jebolan Perguruan Tinggi. Ada kelompok turunan Raja/Sultan sering dipanggil dengan sebutan Tuwanku (Twk) di depan namanya. Kelompok turunan Ulee Balang/Bangsawan yang umumnya memegang kekuasaan di masa penjajah Belanda dipanggil dengan sebutan Teuku (T), di depan namanya. Di samping itu ada pula kelompok masyarakat Aceh yang menghubungkan diri mereka dengan keturunan keluarga Nabi Muhammad yang dipanggil dengan *Habib* atau lebih populer dengan Said (S) di depan namanya. Namun semua strata kedudukan sosial itu tidak menimbulkan hak-hak istimewa pada bidang sosial politik dalam masyarakat, melainkan tergantung pada kemampuan dan kekuatan usahanya.

Lembaga sistem pengendalian sosial melalui agama atau lembaga agama sangat mempengaruhi masyarakat Aceh. Lembaga agama seperti *dayah*/pesantren merupakan wadah pembentukan akhlak mulia. Di Aceh, pesantren menjadi lembaga panutan dalam membina dan membentuk pribadi muslim. Pesantren pada umumnya dipimpin oleh seorang ulama yang karismatik sehingga ia menjadi panutan bagi para santrinya. Namun, berbeda dengan santri di pesantren-pesantren di Jawa, santri pesantren di Aceh tidak begitu mengagungkan ulama. Jika seorang ulama melanggar ajaran agama maka ulama tersebut langsung jatuh martabatnya dan tidak lagi dihormati baik oleh santrinya maupun masyarakat di sekitarnya.

Lembaga agama seperti pesantren merupakan tempat mendidik kader umat yang bermoral tinggi dan dianggap sangat ampuh dalam membina dan mengayomi masyarakat sejak dulu, saat ini dan diprediksikan juga masa depan. Lembaga agama juga mampu menjadi media dalam membawa pembaharuan, terutama dalam pemikiran Islam. Lembaga agama di Aceh sejak dulu sangat berperan dalam mendidik masyarakat guna menjadi pemikir, pemimpin dan cendekiawan. Sebab sejak dulu merupakan lembaga agama di Aceh satu-satunya media untuk membina generasi muda baik segi agama maupun pendidikan umum. Peran pesantren atau *dayah* pada masa kejayaan Islam sangat menentukan dalam mengajak manusia kepada peradaban dan pembaharuan. Akan tetapi peran pesantren menurun dalam bidang pendidikan umum setelah para penjajah datang. Para kolonialis memisahkan ilmu agama dengan ilmu umum, sehingga orang-orang yang pergi ke pesantren hanya diperbolehkan mempelajari tentang '*ubudiyah*'²⁷ saja. Namun demikian

²⁶ Istilah *dayah* merupakan modifikasi dari kata *zawiyah* (bahasa Arab), yaitu suatu ruang atau tempat khusus yang digunakan oleh para praktisi ajaran tasawuf dari kelompok tarekat. Istilah ini kemudian diadopsi oleh ulama Aceh menjadi *dayah* sebagai tempat mengaji atau belajar ilmu-ilmu agama Islam. Di Jawa, istilah lebih dikenal dengan sebutan *pesantren*.

²⁷ Istilah ini dalam arti sempit lebih terfokus pada hubungan manusia dengan Allah semata, yaitu hanya melakukan ibadah secara formal, tanpa memikirkan urusan duniawi. Salah satu strategi

pesantren beserta para ulama sanggup menjadi panutan terutama dalam membina mental spiritual generasi muda. Dengan kata lain, pesantren merupakan media untuk menjaga kestabilan dan keharmonisan hidup dalam masyarakat Aceh .

Masyarakat Aceh sangat menghargai seorang ulama atau orang yang alim, karena seorang ulama selain sebagai *Waratsatul Anbiya'* (pewaris para nabi) sekaligus sebagai penuntun umat ke jalan Allah. Di samping itu, ulama sepenuhnya mengabdikan dirinya untuk masyarakat, tanpa melibatkan dirinya dalam kegiatan politik praktis. Setiap ulama yang melibatkan diri dalam politik praktis diragukan keberadaannya oleh masyarakat. Karena, dalam perspektif masyarakat Aceh, ulama yang berkecimpung dalam politik atau pemerintahan ternodai oleh perilaku menyimpang, seperti korupsi, penyalahgunaan wewenang atau jabatan, dan jauh dari masyarakat. Kana itu, pesantren tempo dulu enggan menerima sumbangan dari pemerintah. Keengganan menerima sumbangan dari pemerintah karena mereka menganggap sumbangan tersebut erat kaitannya dengan unsur-unsur politik. Yang mengikat, terutama pada masa Orde Baru. Biasanya pembangunan *dayah*/pesantren dilakukan oleh ulama bekerja sama dengan masyarakat sekitarnya. Seorang ulama yang sudah terkenal alim dan berwibawa menjadi panutan dan tempat bertanya, baik bidang agama maupun bidang-bidang lainnya. Oleh karena itu warga masyarakat di kampung-kampung kadang-kadang memberikan zakat (sedekah wajib) dan *infaq* (sedekah sunat) kepada ulama. Agaknya, masyarakat lebih percaya kepada kejujuran seorang ulama daripada aparatur negara. Ini menandakan bahwa ulama dianggap lebih jujur daripada pejabat pemerintah.

Nilai dan tingkah laku kehidupan di Aceh memperlihatkan corak Islam dalam hampir segenap aspeknya. Hal ini terutama disebabkan adanya pranata-pranata sosialisasi yang umum berlaku, yaitu pendidikan *dayah* yang telah menghasilkan ulama-ulama militan, yang tidak jemu-jemunya memimpin masyarakat kearah pendalaman ilmu agama dan proses Islamisasi. Para penguasa, termasuk Sultan, sebagian besar pernah mendapat didikan para ulama atau sekurang-kurangnya pernah menerima fatwa dari mereka.

Pada masa lampau pendidikan di Aceh berjalan di bawah pimpinan para ulama. Di antara ulama-lama yang terkenal adalah Hamzah Fansuri, Syeikh Abdurrauf, Nuruddin Ar-Raniry, dan Syamsuddin As-Sumatrani baik pada kesultanan Aceh, maupun pada masa kesultanan Malikul Saleh kerajaan Pase di Aceh Utara. Selain itu ada sejumlah ulama besar yang sangat berperan dalam perjuangan melawan Belanda, yaitu Teungku Chik Di Tiro, Teungku Chik Pante Kulu, Teungku Chik Kuta Karang, dan Teungku Fakinah (wanita). Pengaruh ulama sangat besar, ulama tidak hanya menjadi panutan/pemimpin umat (*informal leader*) tetapi juga menjadi guru spiritual dan motivator perjuangan.

kaum penjajah adalah memberi peluang kepada masyarakat terjajah untuk menjalankan ibadah menurut agama yang diyakininya dan membatasi gerak mereka dalam politik.

Ilmu agama Islam khususnya telah dipancarkan di wilayah Nusantara, sehingga banyak penuntut ilmu dari luar datang ke Aceh; dan sebaliknya penuntut-penuntut ilmu dari Aceh pergi merantau mencari ilmu ke daerah lain, seperti Saudi Arabia, India, Mesir, Turki, Iran, dan lain-lain. Berdasarkan warisan peninggalan dulu, kini pendidikan di Aceh berkembang pesat, baik sistem pendidikan tradisional maupun pendidikan modern. Ada empat bentuk lembaga pendidikan yang berkembang di Aceh hingga saat ini, sebagai berikut:

a. *Lembaga Pendidikan Tradisional*

Lembaga pendidikan ini berbentuk dayah (pesantren) atau rangkang yang dipimpin oleh para ulama (teungku). Dayah tradisional yang berkembang sekarang antara lain ialah: 1) Dayah Darussalam di Labuhan Haji, Aceh Selatan; 2) Dayah Teungku Tanoh Mirah di Samalanga; 3) Pesantren Budi di Lamno, Aceh Barat; 4) Dayah Inshafuddin di Aceh Besar, dan ratusan dayah lainnya.

b. *Lembaga Pendidikan Madrasah*

Lembaga pendidikan ini menganut sistem sekolah murni di bawah Departemen Agama Republik Indonesia. Sistem pendidikan ini memiliki jenjang: Taman Kanak-Kanak(TK), Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN), masa pendidikan 6 tahun; Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN), masa pendidikan 3 tahun; Madrasah Aliyah Negeri (MAN), masa pendidikan 3 tahun; dan Universitas Islam Negeri (UIN) atau Institut Agama Islam Negeri (IAIN), masa pendidikan minimal 4 tahun.

c. *Lembaga Pendidikan Umum*

Lembaga pendidikan ini berada di bawah kendali Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas). Jenjang pendidikannya dimulai dari Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar Negeri (SDN), 6 tahun; Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN), 3 tahun; Sekolah Menengah Umum Negeri (SMUN), 3 tahun; dan Universitas Negeri (UN), minimal 4 tahun.

d. *Kombinasi Pendidikan Dayah dan Umum*

Sejak tahun 1985 berkembang pula sistem pendidikan kombinasi antara pendidikan tradisional dalam bentuk *dayah* dan pendidikan umum (modern) dalam bentuk sekolah, atau lazim disebut *dayah* terpadu. *Dayah* terpadu ini mencoba mengintegrasikan ilmu-ilmu agama Islam (*Islamic knowledge*) dengan

sains (*science*). Pendidikan diselenggarakan dengan sistem sekolah dan asrama (*boarding school*), misalnya Dayah Bustanul ‘Ulum di Langsa, Dayah Jeumala Amal di Lueng Putu, Pidie, dan Dayah Umar Dian di Indra Puri, Aceh Besar. Sistem pendidikan terpadu semacam ini sejak lama sudah lahir seperti di Madrasah Thawalib, Padang Panjang, Sumatera Barat; dan Pondok Modern Gontor, Ponorogo, Jawa Timur. Perbedaan antara pendidikan terpadu dan pendidikan tradisional terletak pada muatan kurikulumnya. Pendidikan tradisional terbatas pada kajian ilmu-ilmu keislaman dengan kajian teks “Kitab Kuning”²⁸; sedangkan pendidikan terpadu selain mengkaji “Kitab Kuning” juga mengajarkan sains dan keterampilan hidup (*life skill*) kepada para muridnya, misalnya keterampilan dalam bidang peternakan, pertanian, perbengkelan, olah raga, dan seni musik. Selain itu, diajarkan kepemimpinan dan kepramukaan. Bahasa yang digunakan dalam lingkungan pendidikan adalah bahasa Arab dan Inggris.

Keempat lembaga pendidikan tersebut mendapat tempat di hati masyarakat Aceh. Pada zaman penjajahan Belanda, sebagian orang Aceh lebih memilih pendidikan *dayah* atau madrasah daripada sekolah umum untuk menyekolahkan anak-anak mereka. Hanya orang-orang tertentu saja yang mau masuk sekolah umum. Apalagi sekolah-sekolah umum pada waktu itu dipimpin oleh orang Belanda. Sebagian kecil dari masyarakat Aceh, khususnya kalangan *Ulee Balang*, diberi kesempatan untuk mengenyam pendidikan di sekolah yang dipimpin Belanda. Sementara sebagian besar masyarakat Aceh menilai sekolah yang dipimpin Belanda itu tidak sejalan dengan ajaran Islam dan siapa yang belajar di sekolah itu dianggap kafir. Begitulah sikap sebagian besar masyarakat Aceh terhadap sekolah umum pada masa itu. Namun, belakangan sikap ini berubah dan bahkan sekolah-sekolah umum sangat diminati. Meskipun demikian, lembaga-lembaga pendidikan agama, terutama yang menggunakan sistem terpadu atau *dayah* terpadu paling digemari dan bahkan menjadi favorit.

4. Relasi Ulama dan Umara: Wacana Kitab Melayu

Jalinan hubungan kerja sama yang harmonis antara ulama dan umara²⁹ mengemuka sejak masa Kesultanan Malikus Salih (abad ke-13). Kemudian tradisi ini

²⁸ Istilah “Kitab Kuning” digunakan oleh santri pesantren tradisional karena sehari mereka mengkaji kitab yang lembaran-lembarannya berwarna kuning dalam bahasa Arab; atau lazim disebut “Arab gundul.” Untuk mengkaji “Kitab Kuning” memerlukan waktu bertahun-tahun, bahkan sampai puluhan tahun. Kemudian, istilah “Kitab Kuning” ini menjadi karakteristik pesantren tradisional meskipun lembaran kitab itu tidak berwarna kuning, seperti kitab cetakan sekarang kertas yang dipakai umumnya berwarna putih. Namun, teksnya tetap dalam bahasa Arab tanpa syakal (Arab gundul). Informasi selanjutnya mengenai “Kitab Kuning” baca Martin van Bruinessen, *Kitab Kuning, Pesantren dan Tarekat*, (Bandung: Mizan, 1999).

²⁹ Kata *ulama*, dalam pandangan masyarakat Aceh, berarti orang yang memusatkan perhatian serius pada kajian ilmu-ilmu keislaman dan berupaya mengamalkan dan mengembangkannya baik

diteruskan oleh sultan-sultan berikutnya dan mencapai momentumnya pada abad ke-16 dan 17. Abad ke-16 dan 17 ini merupakan masa puncak kemajuan dan kegemilangan Kerajaan Aceh dalam berbagai bidang kehidupan: bidang agama, sosial, politik, ekonomi, ilmu pengetahuan dan kebudayaan.

Keharmonisan antara ulama dan umara ditandai pada kebaikan pihak istana (Aceh: *Dalam*) memberikan tempat terhormat kepada ulama. Ulama memainkan peranan penting dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan penyebaran ajaran Islam tidak saja dalam wilayah kerajaan, terutama dalam keluarga istana, tetapi juga ke wilayah-wilayah yang lebih luas, yaitu Nusantara antara lain: Pesisir Timur dan Barat Pulau Sumatera, Jawa, Ternate, Bugis/Sulawesi, Malaka, dan Kedah/Malaysia. Pada masa-masa ini, Kerajaan Aceh dapat dikatakan sebagai pusat pemerintahan, pusat ilmu pengetahuan, dan sekaligus sebagai pusat penyebaran agama Islam di Nusantara. Bagi sultan, ulama dipandang sebagai panutan dan pembimbing kehidupan, penasihat sultan, pembawa ke arah yang benar, dan pengendali kekuasaan. Karena itu, kekuasaan peradilan atau jabatan *qadhi* (hakim) dipegang oleh ulama. Keputusan *qadhi* merupakan keputusan terakhir, dengan sendirinya menjadi kuat, dan harus dijalankan sebagaimana mestinya.³⁰ Dengan begitu, keberadaan ulama menjadi faktor penentu dalam penegakan keadilan; dan kekuasaan akan berjalan secara seimbang.

Penting dicatat bahwa di antara ulama dan umara di Aceh pernah terjalin hubungan kerja sama yang sangat harmonis. Ketika Sultan Iskandar Muda memerintah Kerajaan Islam Aceh Darussalam (1607-1636), dia memilih Syeikh Syamsuddin as-Sumatrani sebagai penasihatnya dan sebagai mufti yang bertanggung jawab dalam urusan keagamaan. Nuruddin ar-Raniry dipilih sebagai *Qadhi Malikul Adil* dan Mufti pada periode Sultan Iskandar Tsani (1636-1641). Ulama ini bertugas tidak hanya dalam bidang agama tetapi juga dalam ekonomi dan politik. Syeikh Abdurrauf al-Sinkili ditetapkan sebagai Mufti dan *Qadhi Malikul Adil* kerajaan Islam aceh selama periode empat orang ratu di Aceh (1641-1699).³¹ Selain ulama-ulama ini, pada masa berikutnya, terdapat pula sejumlah ulama yang mendapat tempat terhormat di istana kesultanan Aceh, semisal Syeikh Saiful Rijal, Syeikh Jalaluddin al-Tarusani, Syeikh Jamaluddin al-Asyi, Syeikh Muhammad Zein, Syeikh Abdullah

melalui proses belajar-mengajar maupun ceramah atau dakwah. Biasanya seorang ulama memimpin *dayah* (pesantren) dan mempunyai sejumlah murid atau santri (di Aceh disebut *aneuk meudagang*) dan dijadikan sebagai tempat bertanya dalam berbagai masalah sosial dan agama. Sedangkan *umara* (bentuk plural dari kata *amir*) adalah pemerintah, penguasa, atau pemimpin yang secara formal memegang kekuasaan. Secara kultural, istilah *ulama* dan *umara* oleh masyarakat Aceh dipandang sebagai dua unsur yang tidak dapat dipisahkan. Keduanya mengandung makna pemimpin yang menjalankan *amanah* (mandat) Allah di muka bumi serta berupaya menegakkan keadilan, menciptakan kedamaian, dan kemakmuran.

³⁰ Lihat A. Hasjmy, *Bunga Rampai Revolusi dari Tanah Aceh*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1978), hlm. 56).

³¹ A. Hasjmy, *59 Tahun Aceh Merdeka di Bawah Pemerrintahan Ratu*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1977), hlm. 175-176.

al-Asyi, Syeikh Muhammad ibn Ahmad Khatib Langien, Syeikh Abbas (Teungku Chik Kuta Karang), dan Syeikh Daud Rummy.

Sejak abad ke-17 bahkan sebelumnya, wilayah Sumatra bagian Barat, khususnya Aceh, telah memiliki posisi dan peran historis yang sangat penting dalam kebangkitan tradisi keilmuan dan keulamaan. Aceh, bahkan, menjadi pusat keilmuan dan keulamaan pertama di Nusantara.³² Menurut Anthony Reid,³³ dilihat dari perspektif Islam, Sumatra Bagian Utara selama lima abad telah menjadi sentral kepulauan Nusantara (*the pivot of the Archipelago*). Adanya berbagai macam pengaruh menciptakan sebuah “laboratorium” intelektual. Kemunculan ulama-ulama besar beserta karya-karyanya dalam berbagai disiplin ilmu, menunjukkan dinamika tersebut. Ulama-ulama itu semisal Hamzah Fansuri (w. 1607) Syamsuddin Sumatrani (w. 1630 M), Nuruddin al-Raniri (w. 1658), dan Abdurrauf al-Sinkili (w. 1693). Berkat keterlibatan mereka dalam wacana pemikiran Islam pada tingkat global, pada gilirannya menciptakan dinamika intelektual Islam Nusantara yang sangat dinamis dan krusial di masa-masa selanjutnya.

Selanjutnya, proses pembentukan dan perkembangan tradisi serta dinamika intelektual Islam di Nusantara terutama Aceh tentunya tidak dapat dipisahkan dari pengaruh pusat-pusat peradaban dunia Islam di Timur Tengah dan bahkan dunia Eropa. Proses perubahan tidak akan terjadi jika tidak ditopang oleh sistem jaringan dan hubungan tertentu. Gelombang-gelombang perubahan yang terjadi di kawasan ini hampir tanpa kecuali, menjadi semangat dan motivasi bagi perubahan-perubahan besar yang senantiasa berasal dari luar Nusantara.³⁴ Faktor eksternal sangat dominan dalam perubahan-perubahan yang terjadi di Nusantara. Perubahan yang signifikan dalam bidang keilmuan dan intelektual mengantarkan Aceh menjadi pusat tradisi penulisan kitab-kitab ilmiah terutama dalam bahasa Melayu.

Hubungan antara umat Islam di dunia Melayu Nusantara dan dunia Islam yang berpusat di Timur Tengah sebenarnya telah terjalin dengan baik sejak masa awal masuknya Islam ke Nusantara. Pada mulanya kontak di kalangan mereka terjalin melalui perdagangan antara Asia Tenggara dan Timur Tengah. Para pedagang di Timur Tengah sering mengunjungi kota-kota pelabuhan di Asia Tenggara. Mereka kemudian, terlibat dalam memperkenalkan dan menyiarkan Islam kepada penduduk pribumi. Hubungan tersebut secara umum menempuh beberapa fase dan juga mengambil beberapa bentuk. Fase pertama, sejak akhir abad ke-8 hingga abad ke-9, hubungan tersebut umumnya berkenaan dengan perdagangan.

³² Azyumardi Azra, *Jaringan Ulama*, hlm. Xix.

³³ Anthony Reid, *The Contest for North Sumatra, Aceh, The Netherlands and Britain, 1858-1898*, (Kuala Lumpur, Singapore, London, New York: The University of Malaya Press, Oxford University Press, 1969), hlm. 1.

³⁴ Harry J. Benda, “Kontinuitas dan Perubahan dalam Islam di Indonesia, dalam Taufik Abdullah (ed.), *Sejarah dan Masyarakat Lintasan Historis Islam Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Obor, 1987), hlm. 27.

Dalam fase kedua, dalam rentang waktu hingga abad ke-15 hubungan antara kedua kawasan mulai mengambil aspek-aspek yang lebih luas berkenaan dengan hubungan keagamaan dan kultural yang terjalin lebih erat. Kemudian, fase ketiga sejak abad ke-16 hingga paruh kedua abad ke-17 hubungan terjalin bersifat politik di samping keagamaan dan kultural.

Pembentukan dan perkembangan tradisi keilmuan berjalan seiring dengan proses islamisasi dan perkembangan sosial, budaya, ekonomi, dan politik. Tradisi tersebut dikembangkan dan dilestarikan secara terus menerus sehingga menjadi tradisi keilmuan dan intelektual yang berlangsung secara berkesinambungan dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Tradisi tersebut umumnya mengacu pada proses transmisi nilai-nilai, pembentukan diskursus keilmuan dan praktik keagamaan. Sebagai inisiator, motivator, bahkan pelopor tradisi intelektual tampil ulama-ulama besar di dunia Melayu sejak abad ke-16 dan 17 Masehi. Di samping ulama Aceh, sejarah Melayu Nusantara juga mencatat munculnya ulama-ulama terkemuka lain di penghujung abad ke-17 seperti Muhammad Yusuf al-Makassari (w. 1699 M) dari Sulawesi Selatan dan Burhanuddin Ulakan (w. 1692 M) dari Minangkabau. Selain itu, muncul pula ulama-ulama besar lain semisal yang muncul pada abad ke-18 dan 19 seperti Abdussamad al-Palimbani (w. 1789 M) dari Palembang, Sumatra Selatan, Muhammad Arsyad al-Banjari (w. 1812 M) dari Kalimantan Selatan, Dawud Ibnu Abdullah al-Fatani (w. 1847 M) dari Thailand Selatan. Kemudian, Muhammad Nawawi al-Bantani (w. 1897 M) berasal dari Serang, Banten adalah ulama Melayu yang sangat terkenal dan berkaliber internasional dengan sejumlah karya ilmiah yang telah dituliskannya, tidak kurang dari 115 kitab yang meliputi bidang-bidang ilmu fiqh, tauhid, tasawuf, tafsir, dan hadits. Di antara karya-karyanya yang terkenal adalah *Lubab al-Bayan fi 'Ilmi Bayan* dan *Maraqah al-'Ubudiyyah Syarh Matn Bidayah al-Hidayah*.

Pada abad ke-18 dan 19 tampil sejumlah ulama Aceh yang sangat produktif melahirkan karya tulis yang dijadikan referensi oleh para pencinta ilmu di Nusantara. Di antara ulama-ulama termasyhur pada abad-abad ini adalah Jalaluddin al-Tarusani, ahli dalam bidang hukum tatanegara dan pemerintahan dengan karyanya yang terkenal *Safinat al-Hukkam* dan *Hidayat al-'Awwam*. Selanjutnya, Muhammad Zain al-Asyi, yang ahli dalam disiplin ilmu hukum syari'ah dan teologi (ilmu kalam). Demikian pula Muhammad al-Langini atau lebih dikenal dengan julukan Teungku Chik di Simpang, mempunyai keahlian dalam bidang tasawuf. Seterusnya, Abbas al-Asyi atau terkenal dengan *laqab* Teungku Chik Kuta Karang (w. 1895 M) yang mahir dalam bidang kedokteran (*al-Thibb*), teknik (*al-Handasah*), dan astronomi (Ilmu Falak). Sedangkan Ismail al-Asyi ahli dalam bidang *editing* kitab. Ulama yang disebut terakhir ini sangat berjasa dalam melahirkan kitab-kitab berbahasa Melayu yang dihimpun dalam *Jam'u Jawami' al-Mushannafat* dan *Taj al-Muluk al-Murashsha bi Anwa'I al-Durar al-Manzhumat*. Kitab *Jam'u Jawami' al-*

Mushannafat di kalangan masyarakat Aceh dikenal dengan sebutan *Kitab Jawami'* atau lebih populer dengan *Kitab Lapan* (Kitab Delapan).³⁵ Dinamakan *Kitab Lapan* karena kitab ini tersusun dari delapan pokok pembahasan atau delapan kitab, yang ditulis dalam bahasa Arab-Melayu.

Namun, Aceh pada abad ke-18 dan 19 mempunyai ciri khusus yang berbeda dengan wilayah lain di Nusantara baik dari sisi politik, ekonomi maupun keilmuan. Pada masa itu berkembang tradisi keilmuan dan lahir karya-karya sastra dan literatur lokal berbahasa Aceh yang ditulis dalam bahasa Arab-Melayu. Dilihat dari khazanah keilmuan Aceh, ulama-ulama yang hidup pada masa ini tergolong produktif dalam melahirkan karya-karya ilmiah. Tidak kurang dari 45 karya yang ditulis oleh ulama-ulama Aceh pada masa itu dan sebagian karya itu digunakan sebagai bahan kajian di berbagai pesantren, termasuk *dayah* di Aceh dan di dunia Melayu Nusantara. Kitab *Bidayah al-Hidayah*, misalnya, adalah salah satu kitab berbahasa Jawi yang menjadi rujukan penting di kalangan masyarakat Muslim Melayu Patani, Thailand. Demikian pula kitab *Shirath al-Mustaqim* karya Nuruddin al-Raniri juga masih dijadikan kitab rujukan utama dalam bidang fiqh di daerah Kalimantan dan Sulawesi. Selain itu, kitab *Mir'at al-Thullab* karya Abdurrauf al-Sinkili merupakan kitab penting dalam bidang hukum Islam yang menjadi bahan kajian para sarjana dan sejarawan Melayu.

Setelah Belanda dapat menawan Sultan Alaidin Muhammad Daud Syah pada tahun 1903 dan tidak diangkat lagi sultan sesudahnya, maka sebagian ulama Aceh kembali ke kampung mereka masing-masing untuk membangun institusi-institusi pendidikan, meskipun harus mematuhi beberapa persyaratan yang ditetapkan oleh Pemerintah Belanda. Sementara sebagian ulama yang lain tetap menyatakan perang melawan Belanda. Setelah pranata kesultanan dieliminasi oleh Belanda, potensi ulama semakin solid dan menghimpun kekuatan bersama masyarakat serta membentuk barisan *jihad fi sbilillah* (perang di jalan Allah) melawan Belanda.

Peranan ulama dan umara dalam mengusir penjajah Belanda tidak pernah henti. Bahkan ketika Aceh dalam situasi perjuangan melawan kaum penjajah Belanda dan Jepang, maka seluruh potensi bangsa dikonsentrasikan pada perjuangan fisik dengan mengangkat senjata. Umara tidak pernah menaruh curiga terhadap ulama. Ulama sebagai pemimpin informal yang memiliki pengaruh besar dalam masyarakat menjadi mobilisator utama bagi umat untuk berjuang melepaskan diri dari belenggu penjajahan. Pada saat-saat seperti ini memang peran ulama cenderung bersinggungan dengan sosio-politik. Namun, dilihat dari kapasitasnya, ulama tidak hanya berperan dalam mendidik umat tetapi juga responsif terhadap persoalan-persoalan yang muncul dan berkembang di tengah-tengah masyarakat. Karena itu, ulama Aceh cenderung memosisikan dirinya sebagai bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan sosial dan politik. Dilihat dari sisi ini, maka tidak mengherankan jika

³⁵Informasi lebih lanjut mengenai kitab ini baca Ismail ibn Abdul Muthalib al-Asyi (ed.), *Jam'u Jawami' al-Mushannafat*, (Mesir: Musthafa al-Bab al-Halabi wa Awladuhu, 1344 H).

suatu ketika mungkin akan terjadi konflik antara ulama dan umara atau antara sesama ulama.

Konflik terjadi ketika kedudukan *qadhi* yang dijabat oleh ulama hanya sebagai alat, sementara *Ulee Balang* menikmati keuntungan darinya. Ketika Habib Abdurrahman az-Zahir memberikan otoritas peradilan agama kepada ulama yang sebelumnya dipegang *Ulee Balang*, pada saat itu sebagai kaki tangan Belanda, maka konflik terjadi tanpa terelakkan berkaitan dengan sikap menghadapi Belanda. Pihak ulama yang dimotori Abdurrahman dan Panglima Polem dan *Ulee Balang* yang fanatik harus mengadakan perlawanan melawan Belanda tanpa mengenal menyerah; sedangkan para *Ulee Balang* yang dipelopori Panglima Tibang berpendapat sebaliknya, yaitu berdamai dengan pihak Belanda.³⁶

Pada masa berikutnya, ketika ulama telah terorganisir secara besar-besaran dalam wadah Persatuan Ulama Seluruh Aceh (PUSA), maka kedudukan dan prestise ulama dalam masyarakat Aceh semakin tinggi. Sementara kedudukan *Ulee Balang* semakin terpinggirkan dari sosio-kultural Aceh karena mereka dekat dengan Belanda. Oleh sebab itu, kehadiran PUSA dituduh sebagai gerombolan untuk menyaingi *Ulee Balang*. Dalam tataran yang lebih ekstrem, PUSA dituduh sebagai organisasi yang berupaya membumihanguskan *Ulee Balang* seluruh Aceh. Kecurigaan ini menyebabkan eskalasi konflik semakin menguat. Karena keberpihakan *Ulee Balang* kepada Belanda, maka ulama (PUSA) bersikeras untuk mengusir Belanda dari bumi Aceh. Salah satu strategi yang ditempuh adalah melapangkan jalan bagi Jepang agar dapat masuk ke Aceh untuk mengusir Belanda.³⁷

Setelah berhasil memasuki Aceh, berkat bantuan ulama, Jepang mulai merekrut ulama Aceh dalam pengendalian wilayah ini menggantikan kedudukan yang sebelumnya dijabat *Ulee Balang*. Bahkan, Jepang memperkuat barisan ulama dalam sebuah organisasi. Konsesi yang menguntungkan ulama ini berbanding terbalik dengan yang diterima *Ulee Balang*. Secara gradual, konflik pun semakin memuncak antara ulama dan *Ulee Balang*; dan mencapai titik kulminasi dengan pecahnya perang saudara di Cumbok, yang terkenal dengan Perang Cumbok. Perang Cumbok ini kemudian mengarah pada revolusi sosial atau disebut juga peristiwa berdarah yang terjadi pada 21 September 1953. Dalam peristiwa ini, Daud Bereueh sebagai ketua PUSA dan ulama kharismatik, sangat berperan.³⁸

Nasib ulama selanjutnya tidak sebaik generasi sebelumnya, ulama pasca kemerdekaan kurang mendapat tempat dan peluang emas untuk berkiprah dalam mengontrol kebijakan penguasa. Ulama hanya menjadi “komoditas politik” penguasa, diperlukan untuk legitimasi kekuasaan. Lebih tragis lagi, pada masa

³⁶ Tim Penulis, *Akar Konflik Manusia*, (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2003), hlm. 96-97.

³⁷ *Ibid.*

³⁸ Informasi secara detail mengenai PUSA dan Perang Cumbok, baca M. Nur El Ibrahimy, *Peranan Tgk. M. Daud Beureueh dalam Pergolakan Aceh*, (Jakarta: Media Da'wah, 2001).

pemerintahan Orde Baru, sebagian ulama Aceh dimanfaatkan untuk mengerahkan massa dalam rangka memenangkan salah satu kontestan peserta Pemilu (Pemilihan Umum). Ulama-ulama dibayar dengan sejumlah uang, diberikan mobil, dan dibangun *dayah*, tempat mereka mengajar para santri. Akhirnya, pamor ulama pun mulai pudar di mata masyarakat. Ada sebagian masyarakat yang memberi gelar kepada ulama yang “gila uang” dengan sebutan “ulama toke”, karena sudah banyak uang sehingga mereka mulai berbisnis, dan membeli lahan-lahan kosong dan sawah untuk investasi. Ada sebagian ulama yang secara terang-terangan terjun ke dalam kancah politik praktis dengan mencalonkan diri menjadi anggota legislatif dan eksekutif. Amat disayangkan, sampai saat ini dapat dikatakan tidak ada lagi ulama sejati di Aceh; yang ada hanya *pseudo*-ulama.

Secara singkat dapat dikatakan bahwa dalam masyarakat Aceh, yang dikenal sangat religius, elite sosial ulama menempati peran signifikan. Meskipun egaliter, dalam kehidupan sosial masyarakat Islam terdapat stratifikasi yang cenderung membentuk piramida. Mayoritas umat Islam berada pada strata bawah dan menengah, lalu mengerucut dan golongan ulama berada di puncaknya. Stratifikasi ini terbentuk atas pertimbangan kualitas dalam konteks intensif atau tidaknya yang bersangkutan terhadap Islam. Ulama, dalam hal ini diakui paling tinggi intensitas keilmuan dan pengamalannya terhadap ajaran Islam serta reputasi keunggulan ilmunya diakui masyarakat. Karena itu, ulama dipandang sebagai sumber kekuatan moral spiritual umat, sumber sosialisasi ajaran Islam, dan sumber kekuatan ikatan solidaritas sosial umat yang diramu dalam suatu ikatan emosional keagamaan yang kokoh.

E. Masjid Sebagai Sentral Kegiatan Masyarakat Aceh

Tidak diragukan lagi bahwa masyarakat Aceh sangat mencintai masjid. Kesalehan dan ketaatan seorang muslim ditandai pada ketekunannya mendatangi mesjid minimal lima kali sehari untuk melakukan shalat berjamaah. Shalat merupakan pilar Islam kedua setelah *syahadatain* (dua kalimat pernyataan keislaman seseorang). Setiap orang yang mengucapkan dua kalimat syahadat dengan penuh kesadaran, tanpa paksaan, dipandang telah menjadi seorang muslim. Sebagai perwujudan apa yang diucapkan itu, ia wajib melaksanakan shalat. Mendirikan shalat berarti menegakkan pilar Islam; sebaliknya, mengabaikan shalat berarti meruntuhkan pilar Islam. Sebab itulah masyarakat Aceh sangat menganjurkan anak-anak mereka menegakkan shalat sejak kecil. Anak yang sudah berusia enam atau tujuh tahun mulai diajarkan tata cara shalat dan bacaan-bacaannya di rumah. Ketika seorang anak mencapai usia sepuluh tahun, oleh orang tuanya diajak ke mesjid untuk melaksanakan shalat secara berjamaah. Shalat wajib lebih utama dilakukan di

masjid, sedangkan shalat sunat lebih baik dikerjakan di rumah. Dalam pandangan Islam, shalat adalah kunci surga. Karena itu, masyarakat Aceh meyakini bahwa setiap orang yang melaksanakan shalat dengan ikhlas dan penuh khidmat (*khusyu*) akan menjadi calon penghuni surga.

Sesuai dengan namanya, masjid berasal dari kata "*sajada*" berarti melakukan sujud, maka "*masjid*", secara literal, bermakna tempat sujud. Di Aceh, seperti di daerah lain, penganut agama yang setia, bila terdapat beberapa kampung yang letaknya berdekatan sehingga memungkinkan masyarakat berkumpul untuk shalat jama'ah dan shalat Jum'at, maka mereka membangun masjid. Biasanya setiap satu mukim, yang terdiri dari beberapa kampung, terdapat satu buah *masjid jami*'. Bahkan, di sebagian kampung (desa) daerah perkotaan terdapat tiga masjid dalam satu desa. Begitulah makna penting masjid bagi masyarakat Aceh sehingga masjid memiliki fungsi fundamental dalam kehidupan mereka. Maka, fungsi utama masjid adalah sebagai tempat sujud yaitu tempat melakukan shalat dan ibadah-ibadah lainnya. Dalam konteks ibadah, masjid merupakan wahana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Seorang muslim, dalam keadaan suci lahir dan batin, yang berada dalam masjid dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah disebut *i'tikaf*. Dengan melakukan *i'tikaf* ia akan memperoleh kekuatan spiritual dan hidayah dari Allah. Dan setiap hamba yang hatinya terpaut dengan masjid akan mendapat perlindungan Allah di hari Kiamat, di saat tiada tempat berlindung dari siapa pun.

Selain sebagai tempat ibadah, masjid juga sebagai pusat segala kegiatan sosial-keagamaan. Di dalam masjid diadakan pendidikan agama baik untuk anak-anak, remaja maupun orang dewasa. Selain itu, perayaan hari-hari besar Islam juga dilaksanakan di masjid. Perayaan hari-hari besar ini merupakan media pembelajaran sosial agar masyarakat lebih memahami dan menghayati ajaran Islam. Maka, setiap acara peringatan kelahiran (*maulid*) Nabi Muhammad, perjalanan nabi ke Masjidil Aqsha, Palestina, dan kemudian menuju angkasa luar (*isra'* dan *mi'raj*), tahun baru Islam, sejarah turunnya Al-Qur'an (*nuzulul Qur'an*), bulan Ramadhan (bulan puasa), pengajian atau ceramah agama, dan hari raya (*Idul Fithri* dan *Idul Adha*) masjid-masjid dikunjungi banyak orang. Bahkan, pelepasan jama'ah haji menuju tanah suci Makkah juga dilakukan di masjid. Dalam suasana ini, tampak persaudaraan dan persatuan di antara anggota jama'ah dan mereka benar-benar merasakan indahnya beragama. Dan masjid benar-benar berfungsi sebagai wadah pemersatu. Tambahan lagi, bagi masyarakat Aceh masjid merupakan pembangkit inspirasi dan motivasi *jihad*. Semangat juang ditanamkan kepada jama'ah di masjid. Dalam kaitan ini, masyarakat Aceh begitu mencintai masjid sehingga masjid tidak boleh diganggu atau dirusak. Ketika orang-orang Belanda mencoba membakar Masjid Raya Baiturrahman, yang terletak di jantung kota Banda Aceh, pada 1873 masyarakat Aceh mati-matian mempertahankannya. Kemarahan masyarakat Aceh mencapai puncaknya, sehingga orang-orang Belanda terpaksa membangun kembali masjid kecintaan rakyat Aceh itu. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa simbol atau

lambang tercapainya cita-cita dapat dilihat pada berfungsinya masjid dan komitmen umat Islam untuk memakmurkannya.

F. Kesimpulan

Karena keterbatasan ruang dan waktu, diskursus mengenai potret Islam di Aceh tidak dapat digambarkan secara utuh. Apa yang telah diuraikan di atas tidak sepenuhnya merefleksikan karakteristik Islam di Aceh saat ini. Tentu saja kondisi keislaman di Aceh sekarang telah terjadi pergeseran (distorsi) baik sikap maupun semangat masyarakat Aceh terhadap pengamalan ajaran-ajarannya. Karena itu, ada nilai-nilai Islami yang masih bertahan dalam kehidupan masyarakat dan ada pula yang sudah sirna ditelan zaman. Namun, semangat keislaman masih tetap berkobar di dalam jiwa orang-orang Aceh, khususnya mereka yang terdidik dalam lingkungan keluarga yang taat beragama. Dalam hal-hal tertentu sebagian orang Aceh saat ini larut dalam perubahan dan kemajuan zaman, sementara sebagian yang lain, terutama kalangan orang-orang tua, masih tetap memegang teguh nilai-nilai lama. Etika Islami tetap mewarnai kehidupan mereka, seperti ketaatan, kelembutan, keramahtamahan, kepedulian, dan kegotongroyongan.

Sebagian generasi muda sekarang sudah mulai jauh dari etika Islami. Mereka lebih memilih hidup dengan pola budaya luar, baik tata cara berpakaian, makanan, minuman maupun gaya hidup. Mereka cenderung meniru apa yang mereka tonton di film dan televisi. Warung-warung yang menyediakan makanan dan minuman sering dipadati kawula muda-mudi. Batasan pergaulan antara laki-laki dan perempuan hampir tidak jelas lagi. Sesuatu yang dulu dianggap tidak senonoh, sekarang dipandang biasa-biasa saja. Tidak jarang terjadi konflik orang tua dan anak ketika terjadi benturan sudut pandang ini. Orang tua memandang sesuatu menurut patokan nilai-nilai lama dan adat istiadat, sementara anak melihat sesuatu menurut nilai-nilai yang ada di zamannya. Karena itu, sedikit sekali kalangan generasi muda sekarang yang peduli terhadap pelestarian tradisi atau budaya Aceh seperti yang pernah dianut pada masa lalu.

Kehidupan masyarakat Aceh erat kaitannya dengan lembaga-lembaga sosial dan keagamaan, antara lain: *meunasah*, masjid, *dayah*, madrasah, dan kantor urusan agama. Hubungan antara masyarakat dengan lembaga-lembaga tersebut adalah karena sifat religius dan fanatik dalam beragama. Meskipun kadang-kadang pengamalan ajaran agama jarang dilaksanakan secara utuh dan disiplin oleh sebagian masyarakat, karena lemah keimanan dan ketaqwaan, rasa simpati terhadap agama sangat menonjol. Semua lembaga sosial dan keagamaan tersebut merupakan pusat perkumpulan anggota masyarakat meskipun secara umum peranan dan fungsinya berbeda antara satu dengan yang lain; namun tujuan akhir adalah sama. Lembaga-lembaga ini merupakan institusi-institusi pembinaan dan bimbingan masyarakat, baik

menyangkut soal kehidupan beragama maupun kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Untuk memahami dinamika Islam di Aceh, antara lain, dapat ditelusuri melalui sejarah awal masuknya Islam ke Nusantara, peran ulama dan umara (penguasa), fungsi lembaga-lembaga pendidikan, dan cara masyarakat memahami dan mengamalkan ajaran Islam. Fenomena ini dapat dilihat dalam kehidupan sosial masyarakat Aceh yang ditandai dengan pengamalan *rukun* (pilar) Islam terutama shalat, puasa, zakat, dan haji. Mengenai shalat ini, masyarakat Aceh memandangnya sebagai ciri utama seorang muslim. Sedangkan puasa dilakukan setahun sekali setiap bulan Ramadhan; dan zakat diwajibkan bagi yang mampu secara ekonomi. Begitu pula kewajiban haji hanya kepada orang-orang yang mampu baik secara fisik maupun material, sekali dalam seumur hidup. Dalam kehidupan sehari-hari, syiar Islam begitu fenomenal ketika ada perayaan hari-hari besar Islam, seperti hari raya *'Idul Fithri* dan *'Idul Adha*, peringatan maulid nabi, dan shalat *tarawih* di bulan Ramadhan. Indikasi ini juga ditemukan di kalangan masyarakat muslim di tempat-tempat lain.

Pada dasarnya, tidak jauh berbeda antara Islam di Aceh dengan daerah-daerah lain. Keunikan Islam Aceh adalah terletak pada semangat kefanatikan beragama yang diwariskan secara turun temurun secara primordial (*taken for granted*) sehingga orang-orang Aceh dikenal sangat agamis (religius), meskipun pada kenyataannya tidak sepenuhnya mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. Secara sosiologis, masyarakat Aceh menempatkan agama sebagai *standard* kebenaran dan kebaikan dalam sistem pergaulan sosial dan adat istiadat. Adat tidak dapat dipisahkan dari syari'at dan syari'at harus berlandaskan *kitabullah* (al-Qur'an) dan sunnah Rasulullah. Pemisahan keduanya dianggap telah menyimpang dari hukum Allah, dan setiap penyimpangan itu disebut kafir dan sesat. Karena itu, ulama merupakan rujukan utama bagi masyarakat Aceh untuk mengetahui benar atau salah suatu masalah yang mereka hadapi. ■

Daftar Pustaka

- Aceh dalam Angka (Aceh in Figures)*, Nanggroe Aceh Darussalam: Badan Pusat Statistik dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, 2003.
- A. Hasjmy, *59 Tahun Aceh Merdeka di Bawah Pemerintahan Ratu*, Jakarta: Bulan Bintang, 1977.
- _____. *Bunga Rampai Revolusi dari Tanah Aceh*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1978.
- _____. *50 Tahun Aceh Membangun*, Banda Aceh: MUI Aceh, 1995.
- _____. *Apa Sebab Rakyat Aceh Sanggup Berperang Puluhan Tahun Melawan Agresi Belanda*, Jakarta: Bulan Bintang, 1977.
- _____. *Peranan Islam dalam Perang Aceh dan Perjuangan Kemerdekaan Indonesia*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.
- _____. (Ed.), *Sejarah Masuk dan Berkembangnya Islam di Indonesia*, (Bandung: PT. Alma'arif, 1993.
- A.K. Jakobi, *Aceh Daerah Modal*, Jakarta: Yayasan Seulawah, 1998.
- Anthony Reid, *The Contest for North Sumatra, Aceh, The Netherlands and Britain, 1858-1898*. Kuala Lumpur, Singapore, London, New York: The University of Malaya Press, Oxford University Press, 1969.
- Azyumardi Azra, *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII & XVIII*, Jakarta: Prenada Media, 2004.
- Badruzzaman Ismail, *Mesjid dan Adat Meunasah sebagai Sumber Energi Budaya Aceh*, Banda Aceh: Majelis Pendidikan Daerah, 2002.
- Harry J. Benda, "Kontinuitas dan Perubahan dalam Islam di Indonesia, dalam Taufik Abdullah (ed.), *Sejarah dan Masyarakat Lintasan Historis Islam Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor, 1987.
- Ismail ibn Abdul Muthalib al-Asyi (ed.), *Jam'u Jawami' al-Mushannafat*, Mesir: Musthafa al-Bab al-Halabi wa Awladuhu, 1344 H.
- M. Nur El Ibrahimy, *Peranan Tgk. M. Daud Beureueh dalam Pergolakan Aceh*, Jakarta: Media Da'wah, 2001

Martin van Bruinessen, *Kitab Kuning, Pesantren dan Tarekat*, Bandung: Mizan, 1999.

Mukti Ali, *Alam Pikiran Modern di Indonesia*, Jakarta: Tintamas, 1964.

Paul van't Veer, *De Atjeh Oorlog*, Amsterdam: De Arbeiderspers, 1969.

Syarifudin Tippe, *Aceh di Persimpangan Jalan*, Jakarta: Cidesindo, 2000.

Taufik Abdullah (Ed.), *Agama dan Perubahan Sosial*, Jakarta: CV. Rajawali, 1983.

Tim Penulis, *Akar Konflik Manusia*, Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2003.